

**EVALUASI KEBIJAKAN JAMINAN
PERSALINAN DI PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

BY

UMMUL KHAIR, SKM MPH

BAPELKES DINKES DIY

Latar belakang

- Tujuan MDGS → menurunkan angka kematian ibu dan bayi belum dapat dipenuhi secara maksimal.
- DIY merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka kematian ibu dan bayi dibawah standar nasional, masih tinggi dibandingkan ASEAN
- Salah satu terobosan untuk menurunkan AKI dan AKB dengan jampersal

-

Cont Latar Belakang

- Pelaksanaan jaminan persalinan di Daerah Istimewa Yogyakarta belum berjalan secara maksimal
- Bedampak pada kepuasan pasien dan petugas pemberi pelayanan
- Masih terdapat beberapa keluhan berkaitan dengan jaminan persalinan
- Evaluasi kebijakan jaminan persalinan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 5 kab/kota

Bahan dan Cara Penelitian

- Rancangan → studi kasus
- Subyek penelitian :
 - A. Regulator → dinas Kesehatan
 - B. Pemberi Layanan → Puskesmas, RSUD, dan Bidan Praktek Swasta yang MOU dengan jampersal
- Pengumpulan Data → Indepth Interview

Hasil Penelitian

- INPUT

- A. Sumber Daya manusia → Belum memenuhi secara kuantitas dan kualitas masih ada RSUD yang belum memiliki dokter obsgyn, keterbatasan tenaga bidan di Puskesmas
- B. Masih kurangnya jumlah MOU dengan bidan → standar kompetensi yang tidak dapat dipenuhi dalam persyaratan MOU

Cont

- Dana
 - A. Nominal jasa yang diberikan tidak sepadan dengan nilai jasanya
 - B. Ada paketan jampersal yang masih menimbulkan kotroversial
 - C. Pengembalian atau pencairan dana memakan waktu yang lama

Cont

- Sarana

- A. Fasilitas dan peralatan di Puskesmas belum kondusif
- B. Kelengkapan peralatan di RS Rujukan ataupun puskesmas PONED belum memadai
- C. Pertimbangan untuk Puskesmas yang jauh dari akses transportasi

Cont

- Kebijakan

→ Tidak sinkron kebijakan pusat dan daerah misal : Iuran Persalinan Normal Rp 500.000 sedangkan IBI Persalinan Normal Rp 700.000

→ Di Gunung Kidul ada Perda yang mengatur pengembaliannya berkisar setengah dari pusat

Evaluasi Kebijakan Jaminan
Persalinan di DIY

Proses

- Sosialisasi Program jampersal -→ belum optimal
- Persyaratan Pasien juga masih membuat pasien untuk malas melengkapi persyaratannya dan juknis menunjukkan KTP tetapi hamil di bawah umur 17 tahun menunjukkan kartu identitas.
- Proses Klaim yang masih rumit dan bertele-tele

Cont

- Prosedur penggunaan jampersal masih bermasalah pada pasien, ex. Pasien mampu tidak menggunakan jampersal dr awal ketika mendatkan penyulit persalinan atau hrus operasi kemudian beralih ke jamperal → membingungkan verifikator dan pemberi layanan dalam klaim

Sistem Rujukan Jampersal

- Masih seringnya terjadi penolakan dan Penumpukan pasien di RS Rujukan
- Alur Rujukan harus ke RSUD dulu kemudian ke RSUP → Puskesmas yang lebih dekat jaraknya dengan RSUP juga kewalahan
- Biaya untuk transportasi rujukan belum sesuai dengan pengembalian

Evaluasi Proses Kebijakan
Jampersal di Daerah
Istimewa Yogyakarta

Ouput

- Penerimaan pasien yang masih belum jelas dan sering “diping Pong”.
- Terjadi penumpukan pasien di rumah sakit rujukan karena sistem rujukan yang kurang jelas
- Masih terdapat pengaduan masyarakat

Tabel Ouput Evaluasi Kebijakan Jaminan Persalinan

Indikator	Yogyakarta	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunung kidul
Penolakan pasien rujukan	Dilakukan	Dilakukan	Dilakukan	Dilakukan	dilakukan
Penumpukan pasien	iya	Iya	iya	iya	iya
Pegaduan pasien	Tidak ada	ada	Tidak ada	Tidak ada	ada

Pembahasan

- Kesiapan Sumber Daya
 1. Ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: 1) standar dan sasaran kebijakan, 2) sumberdaya, 3) komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, 4) karakteristik agen pelaksana, 5) kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan 6) disposisi implementor.

Cont

- Kesiapan sumber daya manusia juga sangat berpengaruh pada fee ataupun hasil jasa yang diberikan.
- Hasil → penelitian bahwa adanya kebijakan puskesmas gratis di Kabupaten Kampar yang tidak diimbangi dengan insentif yang adil kepada petugas menyebabkan petugas memberikan pelayanan tidak prima dan petugas bekerja dengan setengah terpaksa dan melakukan protes yang diwujudkan dengan sikap ngomel dan malas, namun petugas masih taat karena statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil

Cont

- Menurut Weimer dan Vining⁸ bahwa terdapat tiga kelompok variable yang dapat mempengaruhi keberhasilan implemntasi program kebijakan yaitu 1) logika suatu kebijakan 2) sebuah kebijakan harus sesuai dengan tuntutan lingkungan dan 3) kemampuan pelaksana. Masih kurangnya kompetensi kemampuan bidan sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan jampersal mempengaruhi pelaksanaan jaminan persalinan di DIY

Cont

- Salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan kualitas dan kuantitas SDM, biasanya dilakukan dengan contracting out.
- *Contracting out* adalah suatu mekanisme pembelian yang digunakan untuk mendapatkan pelayanan tertentu, dengan kuantitas dan kualitas tertentu, dan harga yang disepakati, dari suatu penyedia pelayanan tertentu, selama suatu periode waktu tertentu

Perbaiki sistem jaminan Persalinan

- Sasaran → Batasan pada anak kebereba untuk mendukung program KB
- Sosialisasi → dilakukan optimal termasuk paketan jampersal
- Proses Klaim dan pembiayaan → masih rumit krn persepsi verifikator berbeda-beda apalagi dengan pemberi layanan → perlu dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis

Sistem Rujukan terintegrasi berbasis Elektronik

- Perlunya membuat sistem rujukan yang online untuk melihat ketersediaan kamar
- Sistem rujukan yang terintegrasi di Kabupaten bahkan antar Kabupaten
- Sistem rujukan perlu dilakukan secara elektronik

Terima Kasih

Atas Perhatiannya